

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring kemajuan teknologi dan ekonomi setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Sistem pemerintahan yang berhasil dipandang sebagai keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap pemerintah berperan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Aspek dalam mengelola sumber daya keuangan menjadi salah satu bagian penting. Dalam hal ini kualitas laporan keuangan pemerintahan juga ditentukan. Proses akuntansi baik yang dilakukan dalam swasta maupun publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan secara formal seperti laporan realisasi anggaran, operasional, saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Persoalan mengenai penyimpangan pengelolaan keuangan masih kerap ditemukan terutama pada penyimpangan APBN dan APBD. Belum lama ini tepatnya bulan Oktober 2022, BPK berhasil menemukan permasalahan ketidakpatuhan diantaranya: kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 17,33 Triliun. Sedangkan 2.651 permasalahan merupakan penyimpangan administrasi. Menanggapi adanya permasalahan tersebut ketua BPK

RI telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan atau uang sebesar Rp. 2,41 Triliun atau 13,9% (Investor ID, 2022).

Sesuai data LKPD yang dicapai kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, tingkat kewajaran berturut-turut mendapatkan opini WTP. Namun, dalam hasil pemeriksaan atas LKPD Pemda Gresik yang diserahkan pada 18 Mei 2022 lalu, sesuai pada Siaran pers BPK Jatim ditemukan kesalahan penganggaran belanja modal pada Dinas Perhubungan serta belanja barang pada sebelas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau dinas. Temuan lain, yakni kekurangan volume atas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Lalu pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum terselenggara secara tertib (Klik Jatim.com, 2022). Selain itu, juga terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada pegawai BPPKAD Gresik, dalam pemotongan insentif pegawai BPPKAD pada tahun 2020. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 4 tahun penjara pada M. Muktar dan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 1.198.688.960 (Bangsa Online, 2020). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian opini WTP tidak menjamin entitas dalam melakukan tindakan korupsi atau tindakan kecurangan lainnya. (Syahara & Aufa, 2022) menjelaskan pemeriksaan tidak dirancang secara khusus dalam mendeteksi adanya korupsi, namun BPK akan tetap mengungkapkan apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap opini pada laporan keuangan.

Penggunaan sistem akuntansi daerah menjadi pondasi dalam laporan keuangan pemda yang dihasilkan, terdiri dari rangkaian proses yang dipenuhi mulai dari proses pendataan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan yang menggunakan sistem yang mana digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Riset terdahulu dalam mengidentifikasi SAKD dilakukan Binawati & Nindyaningsih (2022) ; Gustina (2021) ; Ardianto & Eforis (2019). Binawati & Nindyaningsih (2022) mengungkapkan SAKD berpengaruh signifikan terhadap LKPD, hasil penelitian didukung oleh Gustina (2021). Hasil penelitian bertolak belakang dengan Ardianto & Eforis (2019)

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sumber daya manusia (Hermawan, 2022; Hamruna et al., 2022). Hermawan (2022) mengungkapkan kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan, dibuktikan bahwa adanya SDM yang profesional dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas. Berbeda dengan hasil riset Hamruna et al., (2022) tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Dimana diketahui sumber daya manusia provinsi Sulawesi Tengah masih minim dalam pengetahuan akuntansi, terlebih lagi kepala bidang akuntansi yang diketahui bukan dari lulusan akuntansi.

Faktor ketiga yang memengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan pemda yang berkualitas adalah sistem pengendalian internal pemerintahannya. Pengendalian internal terdiri dari bentuk kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan serta menyediakan laporan keuangan yang andal. Gustina (2021) merupakan literatur pendahulu yang mengungkapkan kelemahan pada SPI dapat dilihat pada laporan yang tidak relevan dengan standar pemerintaham, dan APBN/APBD yang tidak sistematis.

Penelitian atau literatur yang membahas topik mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memang sudah banyak yang mengkaji, namun pembaharuan dalam penelitian ini ialah mengenai kondisi LKPD transisi era pandemic menuju ke endemi yang dihadapi terkait fenomena persoalan penyimpangan yang masih ditemukan. Meskipun pencapaian yang didapatkan pada Kabupaten Gresik telah tergolong baik, peneliti ingin melakukan studi lebih lanjut dalam mengkritisi dan menganalisa lebih dalam mengenai kualitas LKPD yang didapatkan di masing-masing daerahnya. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bukti empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, Maka peneliti me pengujian lanjut dalam bentuk skripsi berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Apakah Adanya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daaerah?
- b) Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daaerah?
- c) Apakah Sistem Pengendaliann Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami bukti empiris pengaruh sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Memahami bukti empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Memahami bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat membagikan pemahaman yang lebih mendalam dan memperkaya pengetahuan mengenai urgensi kualitas laporan keuangan yang didapatkan di sektor pemda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat meluaskan perspektif atau pandangan baru sebagai referensi peneliti dalam mengembangkan kajian terkait, yang mana bisa dijadikan dasar melakukan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan bidang terkait.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ataupun langkah *recovery* bagi pemerintah dalam kualitas laporan keuangan yang

dihasilkan, yang artinya baik itu temuan ataupun rekomendasi dapat dijadikan peluang sebagai perbaikan instansi terkait.

c. Bagi Praktisi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diperkirakan bisa dijadikan suatu rekomendasi dalam pengembangan profesi di lingkup akuntansi pemerintahan dalam sektor publik.

